

ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI PROPINSI MALUKU TAHUN 2000-2004

Agus Tri Basuki

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

agustribasuki@yahoo.com

Abstract

The objective of this study is to analyze the developing of economic and investment in Maluku province period 2000-2004. The result of this study is Maluku has left region position in national economy. And Buru regency has left position in Maluku province. The appropriate strategy for developing Maluku's economy is agricultural development which support tourism industry and free trade era.

Keywords : investment, regional autonomy, regional income

PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah di setiap kotamadya maupun kabupaten di seluruh propinsi. Dengan diberlakukan otonomi daerah ini diharapkan terjadi pembangunan ekonomi yang lebih baik serta terjadi keadilan dalam hal pemertaan pembangunan.

Peranan pemerintah daerah dalam perekonomian suatu daerah tercermin melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja daerah (APBD). Walaupun pemerintah daerah tidak melakukan semua kegiatan ekonomi dan bukan merupakan sumber utama pendapatan daerah, namun pemerintah daerah harus mempunyai sumber pendapatan yang selain dibutuhkan untuk membiayai kegiatan sektornya sendiri, juga untuk membiayai kegiatan sektor lainnya dalam menunjang kehidupan masyarakat .

Dalam APBD belanja pemerintah daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja investasi. Belanja rutin antara lain mencakup belanja pemeliharaan sarana dan prasarana umum. Pada pengeluaran belanja investasi meliputi sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah dan koperasi, sektor pertanian dan kehutanan, sektor transportasi, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sebagainya. Sedangkan pada APBD sisi penerimaan terdiri (a) bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, (b) Bagian Pendapatan asli daerah, dan (c) Bagian dana perimbangan serta (d) Bagian lain-lain penerimaan yang syah.

Pengeluaran pemerintah daerah yang mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah belanja rutin terutama dari kategori belanja pegawai, dan belanja barang serta belanja investasi.

Contohnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengeluaran untuk belanja pegawai akan meningkatkan pendapatan pegawai (Y) dan peningkatan pendapatan tersebut akan menambah permintaan agregat (AD) di dalam ekonomi. Melalui efek penggandaan pendapatan, perkembangan permintaan agregat akan meningkatkan pendapatan pada periode selanjutnya dan seterusnya.
2. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja barang akan menambah jumlah permintaan agregat, sedangkan pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja investasi berdampak positif terhadap produktivitas pekerja dan ini akan mempengaruhi langsung pendapatan dari sisi penawaran.
3. Penambahan dana perimbangan akan mempengaruhi langsung pendapatan daerah (melalui efek belanja pegawai).
4. Pengeluaran rutin lainnya akan berdampak positif langsung terhadap peningkatan jumlah permintaan agregat di dalam perekonomian daerah.

Sedangkan pada belanja investasi, melihat kenyataan bahwa pembangunan daerah terutama Propinsi Maluku masih dalam proses membangun maka pengeluaran belanja investasi yang mencerminkan peranan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah merupakan komponen yang sangat penting dari

APBD. Pengeluaran belanja investasi untuk membangun jalan raya maupun jalan desa, jembatan, irigasi waduk, gedung sekolah dan lain-lain akan terus bertambah mengikuti pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan masyarakat setiap tahunnya.

Dari uraian diatas, kami ingin menganalisis apakah pengembangan ekonomi dan investasi yang sesuai dengan pembangunan Propinsi Maluku berdasarkan data tahun 2000-2004.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas pada latar belakang masalah maka dapat kita turunkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah sektor yang menjadi unggulan Propinsi Maluku
2. Strategi apakah yang dapat dikembangkan di Propinsi Maluku.

TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sektor yang menjadi unggulan Propinsi Maluku
2. Mencari Strategi yang dapat dikembangkan di Propinsi Maluku.

LANDASAN TEORI

Tujuan otonomi daerah menurut Smith (1985) dalam Analisis CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Dari kepentingan ini Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan Pemerintah daerah ada tiga tujuan yaitu :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Konsep Otonomi Daerah

Konsep otonomi yang tertuang dalam UU wacana yang dapat No. 5 tahun 1974 mendapat sorotan dan kajian kritis. Ada dua wacana yang dapat diambil, pertama UU no. 5 tahun 1974 masih relevan hanya belum dilaksanakan secara konsisten, yang kemudian melahirkan kebijakan

pemerintah berupa proyek percontohan otonomi di satu daerah tingkat II untuk masing-masing propinsi. Kedua, UU No 5 tahun 1974 sudah diganti sama sekali karena sistem ini dinilai menghambat proses demokratisasi pemerintahan.

Sebagai bangsa yang berubah, kita harus berani mengubah pola hubungan pusat dan daerah yang paternalistik dan sentralistik menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik. Inilah yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999. Dengan dua undang-undang ini diharapkan dapat meninggalkan paradigma pembangunan yang sebagai acuan kerja pemerintahan. Artinya tidak ada lagi kebijakan pembangunan yang mengandung nilai ketidakadilan dan bersifat mematikan kreatifitas pemerintahan daerah. Perubahan paradigma ini dianggap sebagai suatu gerakan kembali ke karakter pemerintahan yang hakiki. Tujuan utama dikeluarkannya kedua undang-undang tersebut diatas yaitu di satu pihak membebaskan pemerintahan pusat dari berbagai macam persoalan yang tidak perlu mengenai urusan domestik, sehingga pemerintah pusat cukup mengurus kebijakan makro ekonomi yang bersifat strategis.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintahan pusat, dengan keleluasaan merumuskan kebijakan pemerintah daerah. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup, yaitu :

1. Di bidang politik, otonomi daerah merupakan buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, sehingga dapat dipahami sebagai sebuah proses mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.
2. Di bidang ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
3. Di bidang Sosial dan Budaya, otonomi harus dapat dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara dinamika kehidupan di sekitarnya.

Berdasarkan visi ini, maka konsep otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan UU tahun 1999, merangkum hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah.
- b. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah.
- c. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya pemerintahan yang berkualitas tinggi.
- d. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi.
- e. Peningkatan efisiensi

administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah.

- f. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat pengaturan sumber-sumber pendapatan daerah.
- g. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya-upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa.

Menurut Syauckani, Gaffar dan Rasyid (2002: 185-188) ada beberapa ciri khas yang menonjol dari UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yaitu antara lain :

1. Demokrasi dan demokratisasi, diperlihatkan dalam dua hal utama yaitu rekrutmen pejabat pemerintah daerah dalam proses legitasi daerah.
2. Mendekatkan pemerintah dengan rakyat, titik berat otonomi daerah diletakkan kepada daerah kabupaten dan kota, bukan kepada propinsi.
3. Sistem otonomi luas dan nyata, dengan sistem ini pemerintah daerah berwenang untuk melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah.
4. Tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat.
5. *No mandate without Funding*, UU Pemerintah Daerah No 22 tahun 1999 yang kemudian ditegaskan

dengan jelas dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah.

Sementara itu, Diratanayian (1984) mengatakan bahwa otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Artinya pemerintah daerah semakin kreatif dan inovatif dalam mengambil sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

Hakekat dan Manfaat Otonomi Daerah

Secara konseptual, Otonomi Daerah sebagaimana dijanjikan dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan optimisme bagi pengembangan masyarakat baru dan negara Indonesia Baru. Apa yang disebut dengan kemandirian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan rumah tangganya, tampak dengan jelas dalam batasan kewenangan berikut : "Kewenangan daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan". (Ps. 1:h). Adapun kewenangan daerah yang dimaksud dalam UU ini mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Ps. 5:1). Untuk mendukung implementasi dari

UU tersebut, pemerintah bersama DPR juga telah mengeluarkan UU no 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hakikat dari UU terakhir ini adalah memberi basis ekonomi yang diperlukan bagi suatu pemerintah daerah di dalam mengatur rumah tangganya. Adanya perincian yang eksplisit mengenai hak-hak daerah dalam pembagian pendapatan dengan pemerintah pusat, bukan hanya memberikan *political leverage* kepada daerah, melainkan juga memperkuat hak politik daerah untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Menurut kedua UU tersebut terutama UU no 25/1999 Pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan bagi pelaksanaan desentralisasi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan. (Ps.3).

Ada beberapa implikasi positif seandainya kedua UU di atas diimplementasikan secara konsisten (Indria Samego, 2002) :

Pertama, jika otonomi daerah dilakukan, akan memberi ruang lebih longgar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri.

Kedua, implementasi otonomi daerah yang baru mempunyai implimentasi positif terhadap pembagian beban atas persoalan negara-bangsa yang sekarang dihadapi pemerintah pusat. Dengan desentralisasi pemerintahan, akan berimbas pula pada desentralisasi masalah.

Ketiga, redistribusi pendapatan secara lebih adil dan transparansi merupakan hasil dari pelaksanaan otonomi daerah. Selama ini, daerah hanya mendapatkan bagian jauh lebih kecil dibanding pemerintah pusat.

Keempat, pelaksanaan kedua UU ini akan meningkatkan kemandirian dalam menyelenggarakan pembangunan.

Kelima, memperbanyak pasar dalam arti yang sesungguhnya. Jika kita bicara tentang pasar, yang terjadi bukanlah hanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara fair dan transparan. Karena pembangunan yang berlangsung selama ini sangat sentralistik sifatnya, kepentingan negara dan aparturnya menjadi cukup dominan. Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan bila fenomena monopolistik dan oligopolistik yang berkembang. Pada gilirannya kepentingan orang Jakarta lebih menonjol dibandingkan orang daerah.

Keenam, mempertebal tanggung jawab dan akuntabilitas publik terhadap rakyat daerah merupakan dampak positif lain dari otonomi daerah. Salah satu persoalan yang menonjol sekarang ini adalah pelayanan publik.

Ketujuh, otonomi daerah yang dilaksanakan sepenuh hati akan meningkatkan semangat kompetisi yang memang diperlukan dalam era globalisasi pasar sekarang. Dengan adanya otonomi daerah, suasana berkompetensi semakin terbuka.

GAMBARAN UMUM PROPINSI MALUKU

Kondisi Umum

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Propinsi Maluku secara geografis terletak antara 3. - 8. 3T Lintang Selatan dan 125. 4T - 135. Bujur Timur dengan luas wilayah 712.479,69 C2, terdiri dari 658.294,69 Km2 lautan dan 54.185 Km2 daratan. Propinsi Maluku berbatasan sebelah utara dengan Propinsi Maluku Utara, sebelah timur dengan Propinsi Irian Jaya, sebelah barat dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, dan sebelah selatan dengan Negara Timor Leste dan Australia.

Propinsi Maluku secara administratif terbagi atas 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu (i) Kabupaten Maluku Tengah dengan 15 Kecamatan, 296 Desa dan 6 Kelurahan; (ii) Kabupaten Maluku Tenggara dengan 3 Kecamatan, 229 Desa dan 6 Kelurahan; (iii) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan 5 Kecamatan, 187 Desa dan 1 Kelurahan; (iv) Kabupaten Buru dengan 3 Kecamatan, 62 Desa; dan (v) Kota Ambon dengan 3 Kecamatan, 30 Desa dan 20 Kelurahan.

Reorientasi pendekatan pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan kewilayahan, telah menempatkan tata ruang wilayah pada posisi yang sangat strategis dalam seluruh aspek perencanaan pembangunan daerah. Konsep Gugus

Pulau dan Kawasan Laut-Pulau yang dicetuskan jauh sebelum pemberlakuan otonomisasi, akan tetap digunakan dan dikembangkan. Di dalam Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan 6 Gugus Pulau, yaitu: (i) Gugus Pulau Pertama, meliputi pulau-pulau Buru, Seram, Ambon, Haruku, Geser, Gorom, Manawoko, Banda, dan Teon Nila Serua; (5) Gugus Pulau Kedua, meliputi Kepulauan Kei dan Kesui; (iii) Gugus Pulau Ketiga, meliputi Kepulauan Aru; (iv) Gugus Pulau Keempat, meliputi Kepulauan Tanimbar, Larat, Waliaru, Selaru, Selu, Sera, dan Molu; (v) Gugus Pulau Kelima, meliputi Kepulauan Babar, dan Pulau Sermata; dan (vi) Gugus Pulau Keenam meliputi Pulau Damar, Romang, Leti, Moa, Lakor, Kisar, dan Wetar.

Disamping itu terdapat 4 kawasan Laut-Pulau, yaitu (i) Laut Maluku; (5) Laut Seram; (iii) Laut Arafura; dan (iv) Laut Banda. Terkait dengan konsep Gugus Pulau dan Kawasan Laut-Pulau ini, program pengembangan kawasan yang selama tahun-tahun terahir ini dijalankan antara lain Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Andalan (KA), Kawasan Tertinggal (KATING), Kawasan Perbatasan (KABAT), akan terus ditingkatkan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Penduduk

Jumlah Penduduk Propinsi Maluku berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990 sebanyak 1.157.878 jiwa, sedangkan berdasarkan Hasil

Sementara Sensus Penduduk Tahun 2000 meningkat menjadi 1.414.272 jiwa yang berarti selama kurun waktu satu dasawarsa terjadi pertumbuhan sebesar 2,21% rata-rata per tahun. Ditinjau dari sisi persebaran penduduk menurut klasifikasi desa-kota, bagian terbesar penduduk tersebut bermukim di daerah perkotaan yaitu mencapai 73,61%. Dari jumlah penduduk tahun 2000 tersebut di atas, sebanyak 75,56% tergolong dalam kelompok penduduk umur produktif (10 tahun ke atas) dan sebanyak 56,93% daripadanya tercakup dalam angkatan kerja, dengan perincian 91,57% bekerja dan 8,43% sedang mencari pekerjaan atau lazim disebut dengan pengangguran terbuka (open unemployment). Ditinjau dari sisi lapangan pekerjaan, bagian terbesar angkatan kerja yang bekerja berada pada bidang pertanian dalam arti luas, yaitu mencapai 47,46%, menyusul bidang perdagangan dan jasa sebesar 36,11%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 16,43% tersebar dalam sektor-sektor lain.

Memasuki tahun 2001 yang merupakan awal abad 21 sekaligus era millenium ketiga, bangsa Indonesia masih belum mampu keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan dan telah menjalar dalam spektrum yang lebih luas pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta pada

Tabel 1
Kondisi Geografis propinsi Maluku

Luas Propinsi Maluku Menurut Kabupaten/kota dan Dataran Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Luas Dataran Rendah(Ha)
Maluku Tenggara	9.934	1.200
Maluku Tenggara Barat	15.033	1.100
Maluku Tengah	19.594	60.900
Buru	9.247	20.750
Ambon	377	-

Dalam rangka membuka akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat, akan dikembangkan *multigate system*, yang meliputi Kota Ambon, Ilwaki di Pulau Wetar, Sauralaki di Pulau Yamdena, dan Wahai di Pulau Seram. Dalam hubungan ini, jaringan transportasi baik darat maupun laut menjadi sangat penting untuk dikembangkan prasarana dan sarananya, terutama yang menghubungkan antar pusat-pusat pemukiman penduduk, dan antara pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat akumulasi yang selama ini dirasakan masih sangat terbatas. Prasarana transportasi darat terutama jalan dan jembatan pada umumnya terdapat di pulau kecil dengan konsentrasi penduduk yang tinggi seperti Ambon, Kepulauan Lease dan Kepulauan Kei Kecil, sementara pulau-pulau besar masih sangat terbatas, sehingga aksesibilitas antar pusat-pusat pemukiman dengan sentra – sentra produksi dan pemasaran sangat terbatas. Kondisi serupa terjadi pula pada transportasi laut dan udara.

Kondisi geografis wilayah yang mencirikan Propinsi Maluku sebagai

daerah kepulauan, menyediakan berbagai sumberdaya alam yang secara potensial cukup besar baik di kawasan lautan maupun di kawasan daratan. Potensi kawasan lautan berupa Perikanan yang terbesar terdapat di Laut Banda dengan sediaan potensi sebanyak 208.588 Ton dan potensi lestari sebanyak 104.299 Ton per tahun, serta di Laut Arafura dengan sediaan potensi sebanyak 101.540 Ton dan potensi lestari sebanyak 50.770 Ton per tahun. Potensi kawasan daratan terdiri dari (i) Potensi Hutan dengan hutan produksi terbatas seluas 1.349.607 Ha, hutan produksi tetap seluas 576.975 Ha, hutan lindung seluas 839.970, Ha, dan hutan suaka alam dan wisata seluas 404.998 Ha; (ii) Potensi Pertanian, meliputi tanah pertanian seluas 2.833.289 Ha, tanah perkebunan seluas 143.489 Ha, dan tanah padang rumput seluas 60.050 Ha; (iii) Potensi Pertambangan, meliputi emas di Pulau Wetar, Pulau Ambon, Pulau Haruku, dan Pulau Romang; merkuri di Pulau Damar; perak di Pulau Romang; base metal di Pulau Nusalaut; logam dasar di Pulau Haruku; batu solida di Pulau Seram; kuarsa di Pulau Buru; minyak

bumi di Bula; dan mangan di Laut Banda. Di samping potensi sumberdaya alam yang disebutkan di atas, baik di kawasan lautan maupun di kawasan daratan Propinsi Maluku

tersedia pula potensi pariwisata yang tersebar di Nau Ambon, Kepulauan Banda, KepWauan Kei Kecil, Kepulauan Tanimbar, Danau Rana, dan Hutan Wisata Manusela.

Tabel 2

Nama Beberapa Pulau Besar dan Luasnya di Provinsi Maluku Menurut Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pulau (Km2) Luas (Km2)

Maluku Tenggara Barat	Wetar	1.100
	Yamdena	5.085
Maluku Tenggara	Kola	741
	Wokam	954
	Kobror	1.359
	Trangan	1.497
	Mackor	449
Maluku Tengah	Seram	18.625
Buru	Buru	9.000
Ambon	Ambon	761

Perkembangan Ekonomi

Propinsi Maluku pada tahun 2005 memiliki 7 kabupaten dan 1 kotamadya yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kotamadya Ambon. Pemekaran Kabupaten dan kota dari 5 Kabupaten/Kota menjadi 8 Kabupaten/Kota adalah hasil pemekaran UU no 22 tahun 1999. Dari hasil perkembangan ekonomi Propinsi Maluku selama 2000 – 2004 dapat kita amati pada tabel 3.

Pertumbuhan ekonomi secara makroekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah dihitung melalui angka PDRB atas dasar harga konstan (untuk menghilangkan pengaruh fluktuasi harga dalam penghitungan PDRB). Untuk tahun 2001 PDRB atas dasar harga konstan Propinsi maluku sebesar 2.768,3 Milyar rupiah, mengalami penurunan sebesar 0.035 persen dibandingkan dengan tahun 2000, sehingga bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2001 sebesar -0.035 persen. Artinya kegiatan produksi yang dilakukan selama tahun 2001 menghasilkan penurunan nilai tambah 0.035 persen. Penurunan kegiatan ekonomi ini diakibatkan salah satunya adalah imbas dari terganggunya stabilitas wilayah (salah satunya adalah

Tabel 3
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Propinsi Maluku 2000-2004 ADH konstan 2000 (Milyar Rupiah)

Sektor	2000	share	2001	share	2002	share	2003	share	2004	share
1	1011.7	36.5	999.9	36.1	1009.7	35.5	1029.5	34.7	1058.3	34.1
2	21.8	0.8	23.6	0.9	24.4	0.9	25.3	0.9	26.0	0.8
3	149.7	5.4	139.2	5.0	139.5	4.9	142.2	4.8	147.1	4.7
4	24.2	0.9	17.3	0.6	14.6	0.5	15.9	0.5	17.2	0.6
5	31.5	1.1	33.5	1.2	35.4	1.2	37.4	1.3	39.4	1.3
6	634.9	22.9	655.2	23.7	683.2	24.0	719.7	24.2	757.1	24.4
7	231.5	8.4	210.8	7.6	226.1	7.9	257.3	8.7	288.3	9.3
8	143.8	5.2	149.9	5.4	158.5	5.6	168.6	5.7	174.6	5.6
9	520.0	18.8	538.9	19.5	556.3	19.5	574.7	19.3	594.1	19.2
PDRB	2769.3	100.0	2768.3	100.0	2847.7	100.0	2970.5	100.0	3102.0	100.0
Pertumbuhan			-0.034955		2.869856		4.309599		4.427995088	
Jumlah Penduduk	1200067		1240395		1264604		1288813		1313022	
PDRB/kapita (rupiah)	23075878		22317826		22518812		23048061		23624859.29	

Sumber : propinsi maluku dalam angka 2005 (diolah)

terjadinya kerusakan di ambon yang sempat merembes ke wilayah lain). Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 dan 2004 memang relative lebih lambat.

Pada tahun 2002 perekonomian propinsi Maluku mulai membaik, salah satu pendorong membaiknya perekonomian Propinsi Maluku adalah mulai membaiknya stabilitas wilayah, sehingga menjadi modal utama dalam pembangunan suatu daerah.

Secara keseluruhan, sektor-sektor ekonomi yang turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB tahun 2004 mencatat pertumbuhan positif. Bila diurutkan pertumbuhan ekonomi menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi ke yang terendah, maka kontribusi ekonomi yang tertinggi dihasilkan oleh sektor Pertanian yaitu sebesar 34.1 Perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 24,4 persen, dan diikuti oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 19.2 persen.

Sedangkan PDRB perkapita untuk propinsi Maluku juga mengalami perbaikan dari Rp. 23.075.878,- pada tahun 2000, dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 23.624.859,-. Ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2000 hingga 2004 Propinsi Maluku telah berhasil meningkatkan kemakmuran masyarakat, salah satu indikasinya adalah terjadinya peningkatan PDRB perkapita.

Sejalan dengan berbagai keberhasilan yang telah diraih, aspirasi masyarakat kian meningkat. Tantangan baru muncul, tentu dengan intensitas

yang semakin besar, sehingga tantangan yang akan dihadapi bukannya surut melainkan akan cenderung meningkat. Tantangan ke depan yang akan dihadapi propinsi Maluku adalah :

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar dapat menjaga kesinambungan secara berkelanjutan. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi ril yang belum pulih serta rendahnya sektor investasi.
2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan kegiatan ekonomi tidak hanya meningkatkan PDRB semata, melainkan juga meningkatkan lapangan kerja yang lebih besar mengingat pengangguran terus meningkat.

Posisi Perekonomian Propinsi Maluku di Perekonomian Nasional

Struktur ekonomi dan struktur sosial tiap daerah Propinsi berbeda satu sama lain yang didasarkan pada Typology Klassen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi dalam pembentukan PDB Nasional.

Posisi Propinsi maluku terhadap Perekonian nasional ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2004, posisi Propinsi Maluku berada dalam Daerah Relatif Tertinggal. Daerah ini ditandai dengan Rerata pertumbuhan PDRB Propinsi/ rerata pertumbuhan PDB nasional lebih kecil dari satu serta Kontribusi PDRB propinsi/Rerata Kontribusi PDB nasional ≤ 1

Tabel 4.

**Ketimpangan Perkembangan Ekonomi Propinsi Maluku
tahun 2000-2004 terhadap perekonomian nasional**

Proporsi Pertumbuhan	Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi ≥ 1	Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi ≤ 1
Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Propinsi ≥ 1	Daerah Maju Berkembang Cepat	Daerah Berkembang Cepat
Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB propinsi ≤ 1	Daerah Potensial	Daerah Relatif Tertinggal Propinsi Maluku (0.6 dan 0.06)

Keterangan :

1. Propinsi maluku (0.6 dan 0.06) berarti bahwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2004, perbandingan tingkat pertumbuhan PDRB Propinsi maluku terhadap PDB nasional sebesar 0.6 atau < 1 dan Perbandingan kontribusi Propinsi maluku dalam pembentukan PDB nasional sebesar 0,06 atau < 1 .
2. Sumber : Kantor Pusat statistik Propinsi maluku (2000-2004), diolah

Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku Terhadap Kontribusi PDRB Propinsi Maluku

Struktur ekonomi dan struktur sosial tiap daerah Kabupaten dan Kota berbeda satu sama lain yang didasarkan pada Typology Klassen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi dalam pembentukan PDRB Propinsi.

Posisi beberapa Kabupaten dan kota di Propinsi maluku terhadap kontribusi perekonomian Propinsi Maluku ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa sejak tahun 2000 hingga tahun

2004, posisi Daerah Maju Berkembang Cepat ditempati oleh Kotamadya Ambon Daerah ini ditandai dengan Rerata pertumbuhan PDRB Kabupaten/ rerata pertumbuhan PDRB Propinsi lebih besar dari satu serta Kontribusi PDRB Kab / Kota / Rerata KontribusiDRB propinsi ≤ 1 , sedang untuk daerah berkembang cepat diduduki oleh kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk daerah potensial diduduki oleh kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan daerah tertinggal diduduki Kabupaten Buru.

Tabel 5.
Ketimpangan Perkembangan Ekonomi daerah

Proporsi Pertumbuhan	Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi ≥ 1	Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi ≤ 1
Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Propinsi ≥ 1	Daerah Maju Berkembang Cepat Kota Ambon (1.003 dan 2.01)	Daerah Berkembang Cepat Kabupaten Maluku Tenggara

Sumber : Propinsi Maluku dalam angka 2005 (diolah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Shift-Share

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tiap-tiap subsektor terhadap Pendapatan Domestik regional Bruto (PDRB). Analisis Shift-share dapat digunakan untuk mendeskripsikan trend agregat secara statistik, shift-share analisis mengklarifikasikan perubahan PDRB setiap saat dalam wilayah yang diperbandingkan dengan tiga kategori, komponen dalam membentuk shift-share diantaranya adalah PDRB disektor tertentu (i) tingkat wilayah, laju pertumbuhan PDB tingkat nasional (rn), laju pertumbuhan PDB disektor tertentu (i) ditingkat nasional (rin), dan laju pertumbuhan PDRB di sektor tertentu (i) tingkat wilayah.

Komponen perubahan secara nasional mempresentasikan komponen pembagian nasional untuk perhitungan

dimana laju pertumbuhan regional telah mengalami perubahan secara tepat dan nasional untuk semua sub sektor tingkat nasional untuk semua dalam periode penilaian.

Jika pertumbuhan di regional berbeda dengan nasional positif atau negatif dalam PDRB), secara total pergeseran dari pergeseran structural pergeseran mengenai proporsional.

Dampak perubahan dimana dalam perhitungan regional berubah sesuai dengan PDRB dalam sub sektor (termasuk cepat atau lambat pertumbuhan nasional). Pergerakan terdiri dari perbedaan pergeseran juga pengetahuan dampak regional dimana PDRB regional berubah seiring faktor lokasi di tiap regional.

Tabel 6
Perhitungan Shift-share Propinsi Maluku 2000 dan 2004 (Milyar rupiah)

Sektor	2002			2003			2004		
	Nij	Mij	Cij -	Dij	Nij	Mij	Cij	Dij	Nij
1	44.18	-11.6	-22.7	9.93	50.19	-5.55	-24.6	20.09	54.28
2	1.19	-0.94	0.55	0.79	1.23	-1.46	1.14	0.92	1.33
3	7.15	0.22	-7.06	0.31	6.93	0.65	-4.84	2.74	7.54
4	0.64	0.67	-3.56	-2.25	0.78	0.16	0.48	1.42	0.88
5	1.55	0.39	0.06	1.99	1.82	0.67	-0.39	2.11	2.02
6	29.89	-3.25	2.51	29.15	35.09	3.02	0.31	38.42	38.83
7	9.89	9.08	-2.60	16.37	12.54	17.20	5.72	35.46	14.79
8	6.94	3.16	-0.97	9.13	8.22	3.61	-1.09	10.74	8.96
9	24.34	-3.47	-2.86	18.01	28.02	-5.81	-3.19	19.02	30.47
PDRB	125.78	-5.72	-36.6	83.44	144.83	12.50	-26.4	130.92	159.11

Sumber : Propinsi Maluku Dalam angka (ditolah)

Keterangan :

- Nij : Pengaruh Pertumbuhan Propinsi
- Mij : Pengaruh Bauran Industri
- Cij : Pengaruh Keunggulan Kompetitif
- Dij : Analisis Shift-Share

Dari tabel hasil analisis diatas, terlihat pada tahun 2004 terjadi pergeseran pembangunan di Propinsi maluku Yang berpengaruh secara Positif, artinya pergeseran pembangunan dapat dilihat dari laju pertumbuhan yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada table diatas. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan PDRB yaitu sebesar 45,7 milyar rupiah, disusul oleh sector pertanian yaitu sebesar 44,38 milyar rupiah, serta diikuti oleh sector angkutan dan komunikasi yaitu sebesar 37,8 milyar rupiah. Sedangkan sektor yang mengalami perubahan negatif adalah sektor pertambangan yaitu terjadi penurunan 1,31 milyar rupiah.

Walaupun dari hasil shift-share menunjukan hasil semua positif pada tahun 2004 kecuali sektor pertambangan, tetapi tidak terjadi pergeseran perubahan yang signifikan

untuk 3 sektor, yaitu pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, serta angkutan dan komunikasi. Tetapi terjadi perubahan yang sangat signifikan untuk sector pertanian, yaitu dari 9,93 milyar rupiah menjadi 44,38 milyar rupiah, atau meningkat lebih dari 400 persen.

Analisis Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu.

Analisis LQ menunjukan bahwa seluruh kota/kabupaten baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan, memiliki LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa subsektor lapangan usaha. Artinya, semua kabupaten/kota memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang tepat.

Table 7.

Indeks Location Quotient (LQ) Propinsi Maluku Tahun 2000-2001

Lapangan Usaha	Koefisien LQ					Rerata LQ
	2000	2001	2002	2003	2004	
1. Pertanian	2.34	2.31	2.29	2.25	2.24	2.29
2. Pertambangan dan Penggalian	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08
3. Industri Pengolahan	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18
4. Listrik, gas dan Air bersih	1.45	1.00	0.78	0.81	0.83	0.97
5. Bangunan	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
6. Perdagangan, restoran dan hotel	1.42	1.46	1.48	1.49	1.49	1.47
7. Angkutan dan Komunikasi	1.79	1.63	1.57	1.61	1.61	1.64
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Persh	0.62	0.63	0.64	0.64	0.62	0.63
9. Jasa-jasa	2.01	2.10	2.12	2.12	2.10	2.09

Sumber : BPS Propinsi Maluku 2000-2004 (diolah)

Dari hasil perhitungan LQ diatas dapat disimpulkan bahwa propinsi maluku memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, (Rerata LQ = 2.29), diikuti dengan sektor Jasa-jasa (Rerata LQ=2.09), Sektor Angkutan dan komunikasi (Rerata LQ=1.64) dan sektor Perdagangan, restoran dan hotel (Rerata LQ =1.47). Sehingga pemerintah daerah harus mendukung sektor ini untuk dapat meningkat sektor andalan menjadi sektor unggulan, terutama dalam membuat kebijakan ekonomi yang akan berpihat kepada sector tersebut.

Analisis Tipology Klassen

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa sub-sektor maju terdiri dari sektor Perdagangan hotel dan restoran serta sektor jasa. Sedangkan sector yang termasuk dalam sub sektor berkembang adalah sektor pertambangan, sektor bangunan dan sector keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Untuk sub sektor potensial ditempati oleh sector pertanian. Dan untuk sub sektor terbelakang ditempati oleh sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih.

Tabel 8
Tipology Klasen Propinsi Maluku Kalimantan Timur
Tahun 2000-2004

Proporsi		
Pertumbuhan	$\frac{X_i}{\bar{X}} \geq 1$	$\frac{X_i}{\bar{X}} \leq 1$
$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} \geq 1$	Sub Sektor maju Perdagangan, Hotel dan Restoran (1,56 dan 2.17) Jasa-Jasa (1.17 dan 1.74)	Sub Sektor Berkembang Pertambangan (1.56 dan 0.08) Bangunan (1.97 dan 0.11) Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan (1.73 dan 0.50)
$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} \leq 1$	Sub sektor Potensial Pertanian (0.39 dan 0,36)	Sub Sektor Terbelakang Industri Pengolahan (-0.12 dan 0,44) Listrik, gas dan air bersih (-2.3 dan 0,05)

Sumber : Kantor Pusat statistik Propinsi Maluku (2000-2004), diolah

Analisis Perubahan Struktur

Proses transformasi (perubahan struktur ekonomi) dari suatu perekonomian diawali dengan dominasi oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan) menuju perekonomian yang didominasi sektor industri manufaktur (sekunder), disamping

proses pertumbuhan ekonomi dan proses peningkatan pendapatan perkapita, adalah bagian dari proses pembangunan ekonomi.

Dari table dibawah ini, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2000 perekonomian propinsi maluku 37 persen masih mengandalkan sektor

pertanian dan pertambangan. Pada tahun 2004 Peran pertanian mulai menurun menjadi 34 persen, sedangkan tenaga kerja yang mengandalkan sektor pertanian sebesar 61,51 (lihat Maluku dalam Angka 2005) dan prediksi 2010 peran sektor pertanian semakin menurun kurang lebih sebesar 32 persen. Kemudian diikuti dengan peran sektor industri (sektor sekunder) yang pada tahun 2000 sebesar 7 persen dan pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 6 persen. Penurunan sektor ini diakibatkan karena pertumbuhan infrastruktur

pendukung juga mengalami penurunan (listrik, gas dan air minum). Padahal tenaga kerja yang mengandalkan sektor ini sebesar 8.18 persen dari seluruh pekerja dipropinsi Maluku. Dan peran sektor jasa mengalami peningkatan yang sangat tajam dari peranan terhadap PDRB sebesar 55 persen pada tahun 2000 menjadi 57 persen pada tahun 2004. Angka perkiraan untuk tahun 2010 adalah sebesar 62 persen. Sedangkan sector jasa menyediakan sebesar 30.93 dari lapangan pekerjaan yang ada.

Tabel 9

Perubahan Struktur Propinsi Maluku tahun 2000 – 2010.

No	Sektor	2000	Share	2002	Share	2004	Share	2010	Share
1	Primer	1033565	37	1034121	36	1085835	34	1152159	32
2	Skunder	205488	7	189495	7	197353.7	6	198260.2	6
3	Tersier	1530207	55	1624122	57	1868654	59	2235246	62
	PDRB	2769260	100	2847738	100	3151843	100	3585665	100

Sumber : Maluku dalam angka 2005 (diolah)

Dari perubahan struktur ekonomi tersebut, nampak bahwa peranan sektor pertanian memperlihatkan paradoks, semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin cepat pula penurunan sektor pertanian. Implikasi dari hal ini mengingat sebagian besar penduduk (61.51 persen pekerja) Propinsi Maluku masih mengandalkan sektor pertanian, akibatnya penurunan sektor pertanian yang terjadi, antara lain adalah pengangguran di pedesaan, arus urbanisasi makin deras dan kesenjangan sektoral makin meningkat. Dan dalam perkembangan pembangunan ekonomi suatu wilayah, proses penurunan sektor pertanian akan diikuti oleh peningkatan sektor industri. Tetapi perkembangan ekonomi Propinsi Maluku justru penurunan sektor

pertanian juga diimbangi penurunan sektor industri. Sehingga salah satu dimensi permasalahan yang semakin menonjol akhir-akhir ini ialah munculnya fenomena jumlah pengangguran semakin meningkat.

Strategi dan Rencana Pengembangan Ekonomi & Investasi

Berdasarkan kepada karakteristik wilayah dan sumberdaya yang dimiliki Propinsi Maluku maka dapat dikembangkan strategi pembangunan ekonomi yang mengarah kepada 'Pengembangan Pertanian yang mendukung Industri pariwisata dan Perdagangan Bebas'. Alasan dipilih :

1. Perdagangan bebas Zona Asean

sudah sangat dekat, sehingga kita harus selalu berfikir tentang globalisasi.

2. Propinsi Maluku sangat berdekatan dengan Philipina dan, sehingga pengembangan pariwisata juga

diarah ke Propinsi Ambon dan sekitarnya.

3. Pertanian, Perdagangan, hotel dan restoran serta angkutan dan komunikasi masih merupakan sektor unggulan propinsi Maluku.

Tabel 10.

**Strategi dan Rencana Pengembangan Ekonomi & Investasi
Propinsi Maluku Ke Depan**

No	Karakteristik	Strategi Pengembangan Ekonomi
1	Prinsip Pengembangan	• Meneruskan kecenderungan pertumbuhan sektor pertanian • Memacu pertumbuhan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pengembangan industri, baik dalam kualitas maupun kuantitas • Pengembangan sektor industri untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai langkah strategis untuk menyerap lapangan pekerjaan • Pengembangan pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi
2	Pola Keterkaitan Regional	• Tetap dapat melepaskan ketergantungan dari wilayah-wilayah Kabupaten sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan Propinsi Maluku. • Dapat memasok hasil-hasil pertanian kepada wilayah sekitarnya.. • Dapat memperkuat keterkaitan kabupaten dengan tetangga serta kawasan Asia pasifik melalui arus Wisatawan
3.	Keterkaitan Terhadap Pembangunan Regional	• Tetap dapat memperkuat struktur dan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi maluku dari sektor pertanian dan pariwisata. • Dapat menyediakan lapangan kerja jauh lebih besar
4.	Fungsi Wilayah	• Kantong produksi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan) • Kantong industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan • Daerah Tujuan Wisata
5.	Pengembangan Komoditi Andalan	• Komoditi andalan sektor pertanian : beras, ternak, perikanan, dan buah-buahan. • Komoditi andalan sektor industri : industri pengalengan ikan • Komoditi andalan sektor pariwisata : Wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah.

No	Karakteristik	Strategi Pengembangan Ekonomi
6.	Persyaratan Pengembangan	• Tidak memerlukan lahan yang sesuai untuk pengembangan pertanian dan industri dalam jumlah yang sangat luas. • Termanfaatkannya seluruh potensi pengembangan yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pengembangan ekonomi Propinsi Maluku diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan LQ diatas propinsi maluku memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, (Rerata LQ = 2.29), diikuti dengan sektor Jasa-jasa (Rerata LQ=2.09), Sektor Angkutan dan komunikasi (Rerata LQ=1.64) dan sector Perdagangan, restoran dan hotel (Rerata LQ = 1.47). Sehingga pemerintah daerah harus mendukung sector ini untuk dapat meningkat sector andalan menjadi sector unggulan, terutama dalam membuat kebijakan ekonomi yang akan berpihak kepada sector tersebut.
2. Berdasarkan kepada karakteristik wilayah dan sumberdaya yang dimiliki Propinsi Maluku maka dapat dikembangkan strategi pembangunan ekonomi yang mengarah kepada 'Pengembangan Pertanian yang mendukung Industri Pariwisata dan Perdagangan Bebas,'.

Saran

1. Posisi Propinsi Maluku berada dalam Daerah Relatif Tertinggal. Daerah ini ditandai dengan Rerata pertumbuhan PDRB Propinsi/ rerata pertumbuhan PDB nasional lebih kecil dari satu serta Kontribusi PDRB propinsi/Rerata Kontribusi PDB nasional ≤ 1 , sehingga pemerintah daerah harus berusaha dengan keras untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dibanding dengan propinsi lainnya.
2. Kabupaten Buru merupakan kabupaten yang relative tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Propinsi Maluku. Sehingga dalam membangun ekonomi wilayah di Propinsi Maluku pembangunan Kabupaten Buru harus diprioritaskan untuk mengejar ketertinggalannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra Salam, *Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah : Pengalaman Beberapa Daerah*. Jurnal Demokrasi & Ham, V0. 2, N0. 2, Juni-September 2002.
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995.
- Hg. Suseno Triyanto Widodo, *Ekonomi Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- _____, *Indikator Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Indria samego, *Masalah Good Governance di dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Jurnal Demokrasi & Ham, V0. 2, N0. 2, Juni-September 2002.
- Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, 1997.
- Propinsi Maluku dalam Angka, BPS (2000-2004)
- PDRB Propinsi Maluku, BPS (2000-2004)